

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan akuntansi publik di Indonesia terjadi karena adanya peningkatan tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh organisasi, melalui suatu media pertanggungjawaban yang sudah dilaksanakan secara periodik.

Mardiasmo (2002) “menjelaskan akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, dalam melaporkan, menyajikan dan mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang sudah menjadi tanggung jawabnya”. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab terhadap pihak yang telah diberi amanah yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan, pemerintah dengan upaya yang konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan Laporan pertanggung jawaban yang berupa Laporan keuangan.

Tuntutan dari masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik atau *good governance government* semakin meningkat. Kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) wajib ditingkatkan untuk bisa menghasilkan Laporan

keuangan yang baik atau berkualitas. Laporan keuangan sendiri sebagai indikator untuk dapat mengetahui apakah disuatu pemerintahan telah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga didalam hal ini pemerintah diwajibkan untuk dapat menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas.

Prasetya (2005) “menjelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya”. Laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. “Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif Laporan keuangan yaitu Laporan keuangan harus andal (*reliability*), dapat dipahami (*understandbilty*), relevan (*relevance*), dan dapat dibandingkan (*comparability*)” (Bastian, 2006). Jika Laporan keuangan sudah memenuhi karakteristik tersebut maka Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas dan pemerintah daerah telah melaksanakan serta meningkatkan kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut menurut Peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010.

Menurut Mahmudi (2007) “definisi Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi yang akan disajikan oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membantu stakeholder dalam membuat keputusan sosial, ekonomi dan politik sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas”. Maka dari itu pemerintah daerah wajib memperhatikan semua informasi yang telah disajikan didalam Laporan keuangan untuk keperluan pengendalian, perencanaan dan pengambilan suatu keputusan. Informasi yang disajikan didalam Laporan keuangan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dimana pihak-pihak tersebut akan menggunakan informasi yang

telah disajikan didalam Laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Keputusan yang didapat diharapkan bisa membawa pemerintah kearah yang Lebih baik lagi.

Dalam suatu pemerintahan yang berdemokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan dapat digambarkan sebagai suatu hubungan yang keagenan. Karena didalam Laporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai seorang agen yang memiliki kewajiban dalam menyajikan informasi yang bermanfaat bagi semua pihak pengguna informasi Laporan keuangan yang bertindak sebagai principal dalam memberikan penilaian akuntabilitas dan memberikan suatu keputusan baik itu keputusan sosial, ekonomi maupun politik.

Sesuai dengan amanat pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), “menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri”. Untuk melaksanakan amanat tersebut BPK berkendudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Maka dari itu Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapatkan penilaian yakni berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Terdapat empat opini yang akan diberikan oleh BPK RI sebagai pemeriksa Laporan keuangan yang pertama Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang kedua Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang ketiga Opini Tidak Wajar (TP), yang keempat Tidak Memberi Pendapat (TMP) atau pernyataan menolak untuk memberikan opini terhadap Laporan keuangan yang telah disajikan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2011, 2012, dan 2013 BPK RI perwakilan Jawa Timur memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dan untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 BPK RI perwakilan Jawa Timur memberikan Opini Wajar dengan pengecualian, jadi didalam tiga tahun tersebut pemerintah kabupaten Bangkalan mengalami penurunan terhadap opini dari BPK RI. Sedangkan untuk tahun 2017 BPK RI perwakilan Jawa Timur memberikan Opini WTP (http://surabaya.bpk.go.id?page_id=9958). Maka dari itu adanya peningkatan opini yang diterima pemerintah Kabupaten Bangkalan dari BPK RI dari opini WDP pada tahun 2016 meningkat menjadi opini WTP pada tahun 2017.

Meski memberikan opini WTP pada tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan BPK masih menemukan beberapa permasalahan atas pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Bangkalan. Permasalahan tersebut terkait dengan adanya ketidak patuhan atas peraturan perundang-undangan sehingga pemerintah Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat melakukan upaya-upaya terbaik untuk menidaklanjuti permasalahan yang dicantumkan didalam LHP (<http://surabaya.bpk.go.id/?p=21674>), maka dari itu pemerintah Kabupaten Bangkalan masih mempunyai PR untuk kedepannya tentang pengelolaan kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah.

Fenomena yang telah terjadi didalam penyusunan Laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yakni penyusunan Laporan keuangan yang disusun oleh sumber daya manusia yang berada dipenatausahaan keuangan Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengerti dan memahami

dalam pelaksanaan penyusunan Laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya sumber daya manusia tersebut tidak mempunyai atau memiliki ilmu-ilmu akuntansi dan tidak berasal dari pendidikan akuntansi, sehingga menyebabkan kesulitan didalam penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan pedoman pengelolaan Laporan keuangan daerah.

Syarifuddin (2014) mengatakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik, akan melakukan pekerjaannya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sehingga akan bekerja dengan cepat, mudah, serta akan mengandalkan pengalaman yang dimiliki. Hasibuan (2003) "mendefinisikan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu".

Didalam struktur Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah yaitu suatu entitas akuntansi yang memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan atas transaksi belanja, pendapatan, asset dan selain kas yang terjadi dilingkungan OPD. Didalam dunia kerja dipemerintahan, setiap bagian-bagian dalam pemerintahan harus diisi oleh orang yang tepat yakni orang-orang yang memiliki kompetensi, pemahaman dan pengalaman terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya.

Sikap profesionalisme SDM diinstansi pemerintah daerah dapat dilihat dari kompetensi SDM. Kompetensi SDM didalam suatu instansi pemerintah menjadi unsur yang sangat penting didalam pengambilan suatu keputusan, karena SDM memiliki pemahaman, keterampilan dan pengetahuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Masalah yang dihadapi pemerintah yakni karena adanya keterbatasan dan pengelolaan SDM yang tidak baik didalam

instansi pemerintah, ini menjadi suatu fenomena dan masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia.

Penelitian untuk mengetahui apakah Kompetensi SDM dapat mempengaruhi kualitas LKPD pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang membuktikan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasim (2015) dan Zuliatus (2017) yang menemukan bukti bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014), Nova (2015) dan Triyanto (2017) yang menemukan bukti bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Rendahnya suatu kualitas Laporan keuangan juga dipengaruhi oleh peran auditor internal pemerintah. Auditor internal pemerintah memiliki fungsi atau peran sebagai inspektorat yaitu sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 yang bertugas melakukan pengawasan internal, terhadap semua proses kegiatan mulai dari mengaudit, review, evaluasi, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai.

Penelitian untuk mengetahui apakah peran auditor internal dapat mempengaruhi kualitas LKPD pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang membuktikan bahwa peran auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Kerinci. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015) yang

membuktikan bahwa peran audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarifudin (2014) dan Triyanto (2017) yang menemukan bukti bahwa peran auditor internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD.

Selain harus memanfaatkan peran auditor internal, pemerintah daerah harus bisa memanfaatkan teknologi informasi karena teknologi informasi dapat membantu dan meningkatkan kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah yakni dengan membantu pengelolaan data-data yang Lebih cepat, efisien dan efektif. Menurut Widjajanto (2001) “menjelaskan secara umum manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan dalam melakukan proses transaksi dan membantu dalam penyiapan laporan”.

Pada saat ini Organisasi Perangkat Daerah telah memanfaatkan teknologi informasi yang dapat menghasilkan suatu sistem informasi dimana pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai keuangan daerahnya untuk diakses, digunakan dan dikelola oleh berbagai pihak. Sistem informasi yang digunakan pemerintah dikenal dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Didalam Peraturan Pemerintah No 56 tahun 2005 “menjelaskan bahwa sistem informasi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang mengadministrasi, mendokumentasikan, serta mengolah data-data pengelolaan keuangan daerah dan data yang lainnya. Suwardjono (2005) “mengatakan bahwa informasi yang bermanfaat bagi para pengguna merupakan informasi yang mempunyai nilai. Informasi bisa bermanfaat apabila informasi yang digunakan tersebut dapat membantu pengambilan keputusan”.

Penelitian untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kualitas LKPD pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Yudianta (2012) yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Gianyar. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Triyanto (2017) yang juga membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas LPKD Kabupaten Kulon Progo. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) dan Nova (2015) yang menemukan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas lapora keuangan pemerintah daerah.

Komitmen merupakan suatu keadaan dimana seseorang membuat pengakuan atau keterikatan baik kepada diri sendiri, orang lain maupun organisasi. Luthans (2006) “menjelaskan bahwa komitmen organisasi ialah keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai serta tujuan organisasi”. Komitmen organisasi dibangun atas dasar sebuah kepercayaan dari seseorang (pekerja) terhadap nilai-nilai organisasinya, dengan loyalitas yang tinggi, kesetiaan dan keinginan akan mampu mencapai kinerja yang bagus serta menunjukkan dukungan dedikasi yang tinggi dan kuat dalam pencapaian visi dan misi suatu-organisasi. Maka dari itu “komitmen organisasi akan menimbulkan rasa memiliki (*sense of belonging*) untuk para pekerja terhadap organisasi” (Mowday,1982).

Pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan *good governance* dituntut untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban yang Lebih

akurat dan transparan. Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan suatu informasi yang baik dan dapat digunakan oleh pengguna Laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat suatu keputusan-keputusan sosial dan ekonomi. Dengan terciptanya pemerintahan yang *good governance* maka dapat meningkatkan kesadaran dari pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh komitmen organisasi seseorang yang tinggi terhadap organisasinya dimulai dari penganggaran sampai penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap standar akuntansi pemerintah sebagai suatu bentuk terlaksananya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian untuk mengetahui apakah komitmen organisasi dapat mempengaruhi kualitas LKPD pernah dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Arif (2017) yang menemukan bukti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kota Padang Panjang. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Zuliyatun (2017) yang menemukan bukti bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nova (2015) yang menemukan bukti empiris bahwa Komitmen organisasi tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung.

Jadi fenomena mengenai kualitas Laporan keuangan sangat bagus untuk dikaji Lebih jauh lagi, kenyataannya yang ada didalam Laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan dengan data yang tidak sesuai dan tidak berpedoman terhadap SAP. Karena hasil dari penelitian-penelitian

sebelumnya tidak konsisten jadi memberikan motivasi kepada peneliti untuk meneliti kembali mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana kualitas Laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Alasan peneliti memilih kabupaten Bangkalan sebagai tempat penelitian yaitu Opini Laporan keuangan pemerintah kabupaten Bangkalan yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan RI tidak konsisten karna ketika pada tahun 2011, 2012, dan 2013 Laporan keuangan kabupaten Bangkalan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedangkan untuk tahun 2014, 2015 dan 2016 Laporan keuangan kabupaten Bangkalan mendapatkan Opini Wajar dengan pengecualian (WDP) sedangkan tahun 2017 kabupaten Bangkalan kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai bahan pembuatan skripsi dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Peran Auditor Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan”

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan?

3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan?
4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan sehingga kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas.
2. Untuk mengetahui apakah Peran Auditor Internal berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan sehingga kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas.
3. Untuk mengetahui apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan sehingga kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas.
4. Untuk mengetahui apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan sehingga kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah menjadi berkualitas.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

2. Bagi Peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya serta menjadi sumber informasi.
3. Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan ataupun menambah bukti-bukti empiris serta ilmu pengetahuan dalam ilmu bidang akuntansi sektor publik.
4. Bagi pemerintah Kabupaten Bangkalan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dalam peningkatan sumber daya manusia yang berada didalam pemerintahan serta dapat membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5. ORIGINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci), sebagai pengembangan penelitian tentunya akan dijumpai kesamaan terutama yang menyangkut pemilihan Variabel, namun demikian ada beberapa hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang sebagai berikut:

1. Perbedaan dari segi waktu pelaksanaan dan tempat yang menjadi penelitian. Dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Kerinci pada tahun 2014 sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019.
2. Penelitian ini menambahkan dua variabel Independen yakni Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi.

Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Originalitas Penelitian

Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Sekarang
Variabel Independen	Kompetensi SDM dan Peran Auditor Internal	Kompetensi SDM, Peran Auditor Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi
Variabel Dependen	Kualitas Laporan Keuangan	Kualitas Laporan Keuangan
Lokasi Penelitian	Kabupaten Kerinci	Kabupaten Bangkalan
Tahun Penelitian	2014	2019